

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penyakit yang disebabkan oleh virus corona sejak kemunculannya telah menjadi masalah kesehatan dunia dan menjadi perhatian bagi para ilmuwan maupun masyarakat umum. Virus ini bermula saat ditemukannya 27 kasus pneumonia virus corona baru yang dinamai dengan 2019-nCoV di Wuhan. Berkisar antara akhir januari hingga awal febuari 2020 sejak kemunculan kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus positif *Covid-19* di China setiap harinya. badan kesehatan dunia atau *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan *corona virus disease -19* atau yang lebih dikenal dengan istilah *Covid-19* sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (KMMD) yang ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2020 dan pada akhirnya ditetapkan sebagai pandemi pada tanggal 11 maret 2020 (Syafrida & Hartati, 2020).

Pada tahun 2019 ditemukan corona virus jenis baru yang kemudian disebut Sars-Cov2 (*severe acute respiratory syndrome coronavirus 2*) merupakan penyakit infeksi yang dikenal dengan *Covid-19*. Virus ini mempunyai ukuran yang sangat kecil besarnya berkisar antara 120-160nm yang utamanya menginfeksi hewan diantaranya termasuk kelelawar dan unta, serta banyak hewan liar lainnya yang dapat membawa patogen serta bertindak sebagai vektor bagi penyakit menular tertentu. Penularan virus ini menjadi sangat agresif dikarenakan penyebaran dari manusia ke manusia menjadi sumber utama penularan (Purnamasari & Raharyani, 2020).

Pandemi dapat diartikan sebagai wabah yang menjangkit serempak di banyak tempat, dapat meliputi daerah geografis yang luas (KBBI, 2020). Istilah pendemi *Covid-19* merupakan

peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus 2019 yang menyebar di seluruh dunia dan hingga bulan April 2020 terdapat lebih dari 210 yang telah terinfeksi (WHO, 2020).

Pada 30 Maret 2020 terdapat 693.224 jumlah kasus positif serta 33.106 kematian yang terjadi di seluruh dunia. Amerika Utara dan Eropa sudah menjadi pusat penyebaran pandemi *Covid-19*, hal ini dikarenakan kasus terkonfirmasi positif dan kematian telah melampaui China. Peringkat pertama per tanggal 30 Maret 2020 diduduki oleh Amerika Serikat dengan penambahan kasus baru terbanyak yang setiap harinya meningkat dengan jumlah 19.332 kasus, kemudian disusul oleh Spanyol dengan jumlah penambahan kasus sebanyak 6.549 kasus baru (Susilo et al., 2020).

Perkembangan pandemi yang sangat cepat mengakibatkan banyak negara yang tidak siap untuk melakukan adaptasi maupun penanganannya. Sejak munculnya pandemi WHO sebagai badan kesehatan dunia menyarankan penanganan pandemi difokuskan pada aspek kesehatan dengan menerapkan isolasi wilayah serta pelarangan aktifitas yang melibatkan kerumunan. Pemerintah Indonesia dalam merespon hal ini mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020 (PERPPU 01/2020) yang berisi mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Dikes 2019*. Anggaran yang digelontorkan dalam kebijakan ini sebesar Rp 405,1 triliun pada tanggal 31 Maret 2020. Selanjutnya pemerintah menerbitkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan sebagai salah satu upaya percepatan penanganan pandemi *Covid-19* (Wibawa & Putri, 2021).

Penanganan *Covid-19* di Indonesia dinilai memberikan respon yang lambat. Negara-negara di Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam dan Singapura mengadakan pemeriksaan secara

masif serta melakukan *lockdown* secara ketat guna mendeteksi dan mencegah penularan *Covid-19*. Sebagai hasilnya dengan diberlakukannya hal tersebut Vietnam dan Singapura dapat mengontrol laju penyebaran *Covid-19* serta memiliki tingkat kematian yang rendah (Ardiansyah & Pradana, 2021).

Pada tanggal 2 Maret 2020 kasus positif *Covid-19* dilaporkan sejumlah dua kasus di Kota Depok, Jawa Barat dan ini merupakan awal mula *Covid-19* mulai masuk ke Indonesia. Sejak kemunculan kasus pertamanya penyebaran *Covid-19* di Indonesia terjadi begitu cepat sehingga dalam kurun waktu satu bulan, jumlah yang terinfeksi *Covid-19* menyentuh angka lebih dari 1.500 kasus dibarengi dengan jumlah kematian mencapai 139 jiwa. Hingga penghujung bulan Maret 2021 jumlah terkonfirmasi kasus tertular *Covid-19* di Indonesia mencapai angka lebih dari 1,3 juta orang dibarengi dengan jumlah kematian lebih dari 40 ribu jiwa (*COVID-19*.go.id, 2021).

Indonesia merupakan negara yang terkena dampak dari pandemi *Covid-19*, tentu saja hal ini menjadi salah satu masa yang berat bagi negara-negara yang mengalaminya. Dampak yang ditimbulkan akibat pandemi tersebut tidak hanya memberikan dampak secara langsung yang dirasakan dalam aspek kesehatan, namun dirasakan juga dalam aspek kehidupan lainnya seperti aspek sosial dan ekonomi. Kebijakan karantina wilayah dan pembatasan sosial mengakibatkan kegiatan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dibatasi, sehingga pergerakan barang dan jasa terjadi perlambatan. Kondisi yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19* bagi wilayah yang terdampak berlangsung cukup lama dan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Dengan penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi maka akan diikuti dengan dampak ekonomi lainnya seperti tingkat pengangguran yang meningkat. Salah satu kelompok yang paling rentan merasakan dampak pandemi *Covid-19* adalah penduduk miskin. Hal ini juga

telah diprediksikan oleh bank dunia terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin global selama pandemi meningkat (Aeni, 2021).

Intensitas penyebaran pandemi *Covid-19* berbeda di setiap wilayah Indonesia, salah satunya adalah pulau Jawa yang menjadi pusat penyebaran *Covid-19*. Wilayah tersebut memiliki jumlah kepadatan penduduk yang tinggi serta pada umumnya menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi. Oleh sebab itu, kasus positif *Covid-19* dan atau angka kematian yang cenderung lebih tinggi dimiliki oleh wilayah-wilayah tersebut yang mengakibatkan ditetapkan sebagai wilayah zona merah. Karena wilayah-wilayah tersebut menjadi pusat penyebaran *Covid-19* maka wilayah tersebut diharuskan untuk melakukan upaya penanganan dan pencegahan penyebaran *Covid-19* (Aeni, 2021).

Seperti diketahui kasus aktif *Covid-19* melonjak dengan pesat di Kota Bekasi sehingga menjadikan Kota Bekasi sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang banyak menyumbang angka positif. Pada 1 Maret 2021 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengumumkan Kota Bekasi menjadi wilayah zona merah. Berdasarkan data yang didapat dari situs [corona.bekasikota.go.id](https://corona.bekasikota.go.id) pada tanggal 28 Juni 2021 angka kumulatif *Covid-19* berjumlah 52.210 kasus yang terkonfirmasi dengan 594 kasus ditemukan di kecamatan Bekasi utara sehingga menjadikan kecamatan Bekasi utara menjadi kecamatan yang warganya paling banyak terpapar *Covid-19*. Bila dilansir dari laman Pusat Informasi dan Koordinasi *Covid-19* Jawa Barat (Pikobar) data periode 24-30 Mei 2021 menjadikan Kota Bekasi menjadi wilayah pertama dengan penambahan kasus positif *Covid-19* yaitu sebanyak 757 kasus (Waluyo, 2021).

Permasalahan mengenai *Covid-19* adalah masalah bersama. Dari berbagaimacam aspek khususnya peran pemerintah menjadi bagian penting dalam memimpin penanganan pandemi

*Covid-19* ini. Dibutuhkan keberagaman solusi yang tidak hanya melibatkan satu pihak saja melainkan berbagai pihak dibarengi dengan perencanaan yang matang hingga mengantisipasi hasil dalam bidangnya sesuai dengan konsekuensi dampak yang ditimbulkan (Cahyano, 2021)

*Collaborative* dapat berupa sebuah respon terhadap pergeseran-pergeseran maupun perubahan-perubahan dalam lingkungan kebijakan. Pergeseran atau perubahan yang terjadi bisa dalam isu-isu yang semakin meluas atau sulit terdeteksi, jumlah aktor kebijakan yang bertambah, kapasitas pemerintah yang terbatas sedangkan institusi lain di luar pemerintah meningkan dan pemikiran masyarakat yang semakin kritis. Disaat terjadinya pergeseran tersebut maka pemerintah harus segera mengikuti, mengatasi dan atau menyelesaikan isu yang tengah terjadi di dalamnya

Pelaksanaan upaya penanganan pandemi *Covid-19* bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja. Kolaborasi dari aktor lain sangat dibutuhkan yang bertujuan untuk mensukseskan pelaksanaan penanggulangan pandemi *Covid-19*. Hal ini senada dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020Tahun2020 Tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa koordinasi lintas sektor diperlukan agar efektivitas dan efisiensi dalam upaya penanggulangan infeksi virus corona (Rahayu & Dewi, 2007).

Tugas dan peran pemerintah dalam hal ini telah diatur secara konstitusional ialah sebagai penyelenggara pelayanan perlindungan kesehatan. Namun mekanisme serta proses yang normatif tentunya akan sulit menjawab persoalan tersebut. Seluruh pihak dimulai dari pemerintah,

lembaga non pemerintah baik itu privat ataupun *non governance organization* (NGO) serta masyarakat harus saling berkolaborasi guna menghadapi persoalan *Covid-19* yang masih melanda Indonesia khususnya Kota Bekasi. Konsep serta model *Collaborative governance* ialah salah satu alternatif saat ini yang mungkin dapat memberikan jawaban dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari *Covid-19* (Cahyano, 2021).

## **1.2 Perumusan Masalah**

Diperlukan berbagai macam strategi dari berbagai pihak untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penanganan mengenai persoalan *Covid-19* ini. Oleh sebab itu, Penelitian ini menyoroti tentang bagaimana penanganan kasus positif *Covid-19* yang terjadi di Kota Bekasi Melalui model *Collaborative governance*. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana *Collaborative governance* antara pemerintah dengan Rumah Sakit Swasta dalam penanganan pandemi *Covid-19* di Kota Bekasi?
2. Bagaimana efektivitas *Collaborative governance* dalam penanganan kasus positif *Covid-19* di Kota Bekasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan permasalahan yang diidentifikasi, maka tujuan yang akan dicapai oleh penelitian ini ialah :

1. Menganalisis *Collaborative governance* antara pemerintah dengan Rumah Sakit Swasta dalam penanganan pandemi *Covid-19* di Kota Bekasi.
2. Menganalisis efektivitas *Collaborative governance* dalam penanganan kasus positif *Covid-19* di Kota Bekasi

## 1.4 Signifikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi menjadi dua, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

### 1.4.1 Signifikasi Akademik

Rujukan pertama diperoleh dari artikel jurnal berjudul “Implementasi Model *Collaborative governance* Dalam Penyelesaian Pandemi *Covid-19* ” pada tahun 2020 yang ditulis oleh Anang Sugeng Cahyono yang dipublikasikan dalam jurnal Jurnal Publiciana, VOL. 13(1), Hal 83-88. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan mengenai *Covid-19* yang merupakan permasalahan bersama. Semua pihak diperlukan mulai dari pemerintah atau lembaga non pemerintah baik itu privat ataupun *non governmental organization* (NGO) dan masyarakat yang harus saling berkoordinasi untuk menghadapi persoalan mengenai *Covid-19*. Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut ialah bagaimana Implementasi model *Collaborative governance* dalam penyelesaian pandemi *Covid-19*. Penelitian ini merujuk pada teori *Collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008) yang berpebdapat bahwa *Collaborative governance* merupakan pengelolaan beberapa organisasi publik yang bekerjasama dengan pemangku kepentingan di luar pemerintahan termasuk masyarakat yang terlibat dalam merumuskan, memberikan persetujuan dan ikut melaksanakan dalam kebijakan. Pada jurnal ini metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan eksplorasi. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan teori mengenai *Collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell & Gash. Hasil dari penelitian ini menyajikan bagaimana implementasi terkait kebijakan *Collaboration Governance* pada masa pandemi *Covid-19*. Terdapat beberapa kebijakan yang disajikan dalam penelitian ini diantaranya ialah Perppu Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020, dan

Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020. Berdasarkan penelitian tersebut dalam menangani pandemi *Covid-19* pemerintah membentuk tim gabungan satgas yang menggunakan model *collaborative governance*.

Berdasarkan rujukan pertama yang sudah dijelaskan di atas, relevansi tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan sama-sama meneliti mengenai *Collaborative governance* dan didapatkan rujukan teori mengenai *Collaborative governance* yang dapat digunakan dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dianggap dapat dijadikan bahan reerensi untuk penelitian yang sedang dilakukan.

Rujukan kedua diperoleh dari artikel jurnal berjudul "Birokasi Dan Kebijakan Percepatan Penanganan *Covid-19*" pada tahun 2020 yang ditulis oleh Anin Dhita Kiky Amrynudin dan Riris Katharina pada jurnal Jurnal bidang politik dalam negeri info singkat kajian singkat terhadap isu actual dan strategis Vol. XII, No.9/I/Puslit/Mei/2020. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terus melonjaknya angka positif *Covid-19* sehingga melahirkan beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan presiden joko widodo guna mempercepat penanganan *Covid-19*. Birokrasi yang berbelit, lamban dalam merespon dan ragu-ragu menyebabkan kurang efektifnya penanganan *Covid-19* sehingga untuk menekan angka positif *Covid-19* sulit. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah penulis dalam jurnal ini mencoba menganalisis tantangan yang dihadapi oleh birokrasi dalam penanganan *Covid-19*. Metode penelitian yang digunakan dalam Artikel Jurnal ini ialah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini bersisi mengenai persoalan birokrasi dalam penanganan *Covid-19* yang dinilai masih berbelit. Hal ini dapat dilihat pada saat daerah hendak memberlakukan PSBB di daerahnya karena sulitnya mendapatkan persetujuan dari Menkes. Jarak antara pemerintah Kabupaten atau Kota dengan pemerintah pusat juga merupakan salah satu penyebab berbelitnya birokrasi. Menurut pemerintah daerah persyaratan dokumen yang



harus disiapkan juga tergolong sulit dan cukup banyak untuk dipenuhi. Salin itu juga birokrasi yang lamban dalam merespon situasi penanganan *Covid-19* mengakibatkan tingginya angka kematian akibat *Covid-19* di Indonesia. Birokrasi di Indonesia pada saat pandemi masih penuh dengan keraguan dalam mengambil keputusan. Hal ini nampak dalam kasus kebijakan terhadap ojek online pada masa pandemi. Dimana Menteri Perhubungan (Menhub) mengeluarkan Peraturan Menhub Nomor 18 Tahun 2020 yang bertentangan dengan Peraturan Menkes Nomor 9 Tahun 2020. Birokrasi yang berbelit, lamban dalam merespon dan ragu-ragu berakibat tidak efektifnya penanganan *Covid-19* sehingga sulit menekan angka positif. Berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan percepatan penanganan penanganan *Covid-19* di Indonesia ditentukan oleh birokrasi. efektivitas penanganan *Covid-19* di Indonesia yang berakibat pada terus meningkatnya angka positif bahkan angka kematian dipengaruhi oleh faktor birokrasi yang berbelit, lamban dalam merespons, dan ragu-ragu telah berakibat. Dalam mewujudkan agilitas birokrasi di Indonesia khususnya dalam hal percepatan penanganan *Covid-19* dihadapkan pada tiga tantangan, diantaranya birokrasi yang terus berubah dan bergerak cepat, birokrasi yang memiliki fleksibilitas melalui asas diskresi, dan birokrasi yang mampu menghasilkan informasi yang jelas dan data yang akurat.

Berdasarkan rujukan kedua yang sudah dijelaskan di atas, relevansi tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan ialah memberikan gambaran mengenai penanganan *Covid-19*. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dianggap dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian yang sedang dilakukan. Dari penelitian tersebut memberikan sumbangsih dalam peraturan-peraturan mengenai penanganan *Covid-19* di Indonesia.

Rujukan ketiga diperoleh dari artikel jurnal berjudul “Inovasi Layanan Publik Pusat Informasi Dan Koordinasi Jawa Barat (PIKOBAR) Saat Pandemi *Covid-19* ” pada tahun 2020

yang ditulis oleh Syaidah pada Jurnal Ilmu Komunikasi Dialektika Vol. 7 No. 2 (2020): September, 148-158. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin bertambahnya kasus positif *Covid-19* di Indonesia memaksa Pemerintah baik Pusat maupun Daerah mengeluarkan kebijakan maupun inovasi guna mengupayakan penanggulangan wabah *Covid-19*. Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespon hal tersebut dengan membuat inovasi pelayanan publik yang diberinama "PIKOBAR". Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini di mana peneliti mencoba menggambarkan bagaimana inovasi pelayanan publik tentang pencegahan dan penanggulangan *corona virus disease 19 (Covid-19)* berbasis inovatif di provinsi Jawa Barat . Penelitian ini merujuk pada teori Colville & Carter, Inovasi merupakan salah satu bentuk perubahan dalam sektor publik. Penggabungan unsur-unsur yang dapat digolongkan serta merupakan suatu kombinasi yang diambil dari beberapa unsur yang sudah ada atau bahkan suatu perubahan yang signifikan yang berasal dari tradisional dalam melakukan suatu hal yang mengacu pada produk yang baru dan kebijakan, program dan pendekatan yang baru. Pada jurnal ini metode yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung penanganan pandemi *Covid-19* membuat sebuah inovasi pelayanan publik berupa PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi *COVID-19* Jabar). Terdapat fitur-fitur yang sangat membantu dan menarik diantaranya ialah fitur aduan bantuan sosial (bansos), fitur SOLIDARITAS (Sistem Online Data Penerima Bantuan Sosial yang menyajikan data bagi penerima bantuan sosial di wilayah Jawa Barat secara komprehensif. Terdapat fitur unggulan yang digemari warga ialah fitur data informasi kasus di Jawa Barat , nasional, hingga dunia, cek sebaran kasus, serta periksa mandiri. Pikobar menjadi terobosan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berusaha menyederhanakan prosedur birokrasi yang memakan

waktu lama bila dilakukan secara manual. Artikel jurnal ini berkontribusi memberikan wawasan mengenai bagaimana kondisi *Covid-19* di Jawa Barat serta teori inovasi pelayanan publik.

Berdasarkan rujukan ketiga yang sudah dijelaskan di atas, relevansi tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan ialah memberikan gambaran bagaimana pemerintah Jawa Barat dalam penanganan *Covid-19*. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dianggap dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian yang sedang dilakukan. Dari penelitian tersebut memberikan sumbangsih dalam peraturan-peraturan mengenai penanganan *Covid-19* di Indonesia.

Rujukan keempat diperoleh dari artikel jurnal berjudul “Pembiayaan Pasien *Covid-19* Dan Dampak Keuangan Terhadap Rumah Sakit Yang Melayani pasien *Covid-19* Di Indonesia Analisis Periode Maret 2020 - Desember 2020” pada tahun 2021 yang di tulis oleh *Wiwil Ambarwati pada jurnal* ekonomi Kesehatan Indonesia vol. 6 no. 1 (2021) 23-37. Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin melonjaknya kasus positif covid sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging (PIE) Tertentu di mana tertuang Pembiayaan pasien *Covid-19* yang dirawat dapat diklaim ke Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pelayanan Kesehatan. Guna menangani kasus *Covid-19* Kesehatan telah menetapkan 132 Rumah Sakit rujukan *Covid-19* melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/275/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu/*COVID-19*. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana regulasi pemerintah dalam pembiayaan *COVID-19* di Rumah Sakit, kendala dari pelaksanaan kebijakan tersebut, serta dampaknya pada keuangan Rumah Sakit di Indonesia.

Metode dalam penelitian ini berupa deskriptif analitik dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, ARSSI, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), serta penelusuran literatur dari jurnal ilmiah. permasalahan klaim *COVID-19* pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) merupakan variabel yang dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya rekomendasi akademik dari penelitian tersebut ialah Rumah Sakit melakukan perbaikan administrasi klaim, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan meningkatkan sinergi dalam sosialisasi kebijakan teknis klaim kepada Rumah Sakit dan semua pihak yang terlibat dalam proses klaim, Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi terhadap implementasi regulasi teknis, Pemerintah memberikan dukungan khusus kepada Rumah Sakit yang melayani *COVID-19* , Dalam mengantisipasi kemungkinan yang terjadi Rumah Sakit perlu menyusun rencana strategis keuangan, termasuk jika kasus *COVID-19* sudah berkurang.

Berdasarkan rujukan keempat yang sudah dijelaskan di atas, relevansi tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan ialah memberikan gambaran bagaimana penanganan kasus positif *Covid-19* dan dampaknya bagi Rumah Sakit. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dianggap dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian yang sedang dilakukan. Dari penelitian di atas memberikan sumbangsih dalam peraturan-peraturan mengenai penanganan *Covid-19* di Indonesia.

Rujukan kelima diperoleh dari artikel jurnal berjudul “Evaluasi Kesiapan Rumah Sakit Menghadapi Bencana Non-Alam: Studi Kasus *Covid-19* Di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta” pada tahun 2021 yang ditulis oleh Yohana Puji Dyah Utami, Rizaldy T. Pinzon, Andreasta Meliala dalam Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI Volume. 10 No. 02 juni 2021 Halaman 100-106. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Negara-negara yang terdampak sangat

tidak siap termasuk juga Indonesia pada saat terjadi lonjakan jumlah penderita *Covid-19* yang memerlukan perawatan intensif di Rumah Sakit. Kesiagaan Indonesia dalam menghadapi *Covid-19* baru mulai ditunjukkan setelah ada kasus terkonfirmasi *Covid-19* yang dilaporkan pada 2 Maret 2020. Kasus positif terus bertambah dari hari ke hari secara eksponensial. Mulai muncul transmisi lokal di daerah-daerah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana mekanisme *surge capacity* Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dalam menghadapi lonjakan pasien terkait *Covid-19*. Hasil dari penelitian ini berupa Status keseluruhan fasilitas kesehatan berdasarkan skor HIS termasuk klasifikasi B, dengan indeks keamanan sebesar 0,46. Dengan klasifikasi B, maka secara keseluruhan tingkat keamanan dan penanganan darurat dan manajemen Rumah Sakit saat ini adalah sedemikian rupa sehingga keamanan pasien dan staf Rumah Sakit, serta kemampuan Rumah Sakit untuk berfungsi selama dan setelah bencana darurat berpotensi berisiko. Koordinasi manajemen belum efektif karena anggota tim belum dilatih dan belum dijelaskan tanggung jawabnya secara terperinci sehingga konsep ICS belum dipahami sepenuhnya.

Berdasarkan rujukan kelima yang sudah dijelaskan di atas, relevansi artikel jurnal ini dipilih karena memberikan kontribusi gambaran umum mengenai kesiapan Rumah Sakit dalam menghadapi pandemi *Covid-19*. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dianggap dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian yang sedang dilakukan. Dari penelitian di atas memberikan sumbangsih dalam peraturan-peraturan mengenai penanganan *Covid-19* di Indonesia.

Rujukan keenam diperoleh dari artikel jurnal berjudul “Penanganan Pandemi *Covid-19* : Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Bersama KNPI Gianyar Di Kabupaten Gianyar, Bali” pada tahun 2020 yang ditulis oleh Ni Made Dwi Arisanti dan I Wayan Suderana dalam jurnal Spirit

Publik Volume 15, Nomor 2, 2020 Halaman 87-96. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dalam penanganan pandemi tidak cukup bila hanya mengacu pada instruksi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi saja. Pemerintah kabupaten Giayar dalam merespon hal tersebut mengimplementasikan instruksi Bupati Gianyar Nomor: 140/928/DPMD/2020 tentang Percepatan Penanganan dan Pencegahan Penularan *Covid-19* di Desa atau Kelurahan di Kabupaten Gianyar dengan menerapkan konsep *Collaborative governance* bersama komite nasional pemuda Indonesia (KNPI) Giayar. Upaya yang Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teori yang dirujuk dalam jurnal ini adalah (Edward M Marshall, 1995) yang mendefinisikan Kolaborasi ialah proses awal dari kerjasama yang melahirkan terobosan, kepercayaan, dan integritas. Kolaborasi dalam sektor publik dipercaya akan menghasilkan barang serta peningkatan pelayanan publik. dalam proses *governance* terdapat 3 aktor yang berpengaruh diantaranya ialah, pemerintah, swasta, dan masyarakat yang saling berkolaborasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Abidarin dan Anggreni, 2013:10). Hasil dari penelitian ini ialah pemerintah kabupaten Giayar dalam penanganan pandemi *Covid-19* , berkolaborasi bersama KNPI Gianyar yang berperan mewadahi pemuda di seluruh wilayah Kabupaten Gianyar. kolaborasi ini terbilang unik yang menghasilkan kerjasama yang terfokus pada pencegahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk Aplikasi Karina, aplikasi Karina hadir untuk menjawab kekhawatiran masyarakat dengan peningkatan kasus *Covid-19* setiap harinya. Hal lain juga ditunjukkan dengan melakukan kolaborasi yang mengadopsi tradisi menyama braya (gotong royong) dengan membentuk tim yang dinamai Satgas Pemuda Perangi *Covid-19*.

Berdasarkan rujukan keenam yang sudah dijelaskan di atas, relevansi artikel jurnal ini dipilih karena memberikan kontribusi. Pemilihan artikel jurnal ini dipilih karena memberi kontribusi teori dalam penelitian yang mendefinisikan mengenai *Collaborative governance* dalam penanganan *Covid-19* di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dianggap dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian yang sedang dilakukan.

Rujukan ketujuh diperoleh dari artikel jurnal berjudul “Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan *Covid-19* di Indonesia” pada tahun 2021 yang ditulis oleh Dian Kus Pratiwi dalam *Amnesti: Jurnal Hukum* vol.3 No. 1 (2021) hal. 37-52. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kondisi darurat yang disebabkan oleh *Covid-19*. Hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, namun tetap diperlukannya peran pemerintah daerah dalam penanganannya. Oleh sebab itu diperlukannya inovasi kebijakan dari pemerintah daerah tanpa mengesampingkan kebijakan terdahulu yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi urgensi dan bentuk inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi *Covid-19*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan studi kepustakaan. Peran gubernur dalam penanganan pandemi covid-19 dianggap penting karena menyangku bahwa dalam konteks negara kesatuan terdapat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah baik hubungan kewenangan, keuangan, maupun hubungan pengawasan, berikutnya terdapat problematika hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara umum maupun dalam penanganan *Covid-19* di Indonesia mengakibatkan ketidak efektifan penanganan *Covid-19*, selanjutnya sejumlah peraturan dan kebijakan pemerintah pusat belum cukup efektif mengatasi pandemi *Covid-19*. pemerintah daerah sebagai bagian pemerintah pusat dan wakil rakyat di daerah memiliki tanggung jawab langsung kepada masyarakat di terhadap Kesehatan dan keselamatan rakyat di daerah.

Berdasarkan rujukan ketujuh yang sudah dijelaskan di atas, relevansi tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan sama-sama meneliti mengenai peran pemerintah dalam penanganan kasus positif *Covid-19* dan didapatkan peraturan-peraturan mengenai penanganan *Covid-19* yang digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dianggap dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian yang sedang dilakukan.

Rujukan kedelapan diperoleh dari artikel jurnal berjudul “Dinamika *Collaborative governance* Dalam Studi Kebijakan Publik” pada 2019 yang ditulis oleh Ni Luh Yulyana Dewi dalam jurnal Ilmiah *Dinamika Sosial* Vol3, No.2, Hal 200-210. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh *Collaborative governance* dalam Dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu konsep yang seiring berjalannya waktu semakin digemari oleh para akademisi. *Collaborative governance* hadir guna merespon terjadinya kegagalan implementasi, biaya mahal dan politisasi regulasi sektor publik. Fokusnya mengarah kepada setiap tahapan kebijakan publik. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah mencermati bagaimana dinamika *Collaborative governance* dalam studi kebijakan publik yang berkaitan dengan nilai dasar dari perspektif “*new public governance*”. Kajian teori yang dirujuk dalam penelitian ini ialah Carl J Frederick yang dikutip oleh Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Ansell & Gash, 2007, *Collaborative governance* menekankan enam kriteria yaitu : (1) forum ini diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga, (2) peserta dalam forum termasuk aktor swasta, (3) peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya sebagai penyedia



layanan oleh agensi publik, (4) terorganisir, (5) forum bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus dan (6) fokus kolaborasi ada pada kebijakan publik maupun manajemen publik. Adapun hasil dari penelitian ini Kolaborasi digunakan untuk menggambarkan kerjasama yang formal, aktif, eksplisit dan berorientasi kolektif dalam manajemen dan kebijakan publik. Adapun nilai dasarnya yakni orientasi konsensus dalam pengambilan keputusan (tujuan), kepemimpinan kolektif dalam kelembagaan (struktur), komunikasi multiarah dalam hubungan kemanusiaan (interaksi) dan berbagi sumber daya dalam aksi (proses). Nilai dasar tersebut menjadi satu kesatuan yang terintegrasi pada setiap tahapan kebijakan publik.

Berdasarkan rujukan kedelapan yang sudah dijelaskan di atas, relevansi artikel jurnal ini dipilih karena memberikan kontribusi. Pemilihan artikel jurnal ini dipilih karena memberi kontribusi teori dalam penelitian yang mendefinisikan mengenai *collaborative governance*. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dianggap dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian yang sedang dilakukan.

Rujukan kesembilan diperoleh dari artikel jurnal berjudul “Dampak Pandemi *Covid-19* Terhadap Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Di Indonesia” paada 2021 yang ditulis oleh *Nina Sarasnita, Untoro Dwi Raharjo dan Yafi Sabila Rosyad* dalam jurnal *Kesehatan stikes prima bukittinggi Vol. 12* Supplemenntary 1 (2021) Hal. 307-315. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pandemi *COVID-19* yang melanda di berbagai negara turut memberian dampak sektor pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan bagi pasien non *Covid-19* turut mendapatkan dampaknya. Pada konteks Indonesia, kondisi pandemi *Covid-19* dan kebijakan penanganannya memengaruhi pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit. adapun tujuan dari penelitian ini ialah guna mengidentifikasi dampak pandemi *Covid-19* terhadap pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif dengan kajian

literatur dengan Analisis dilakukan secara tematik terhadap artikel yang layak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dampak terhadap Rumah Sakit dari pandemi ini salah satunya adalah terjadinya penurunan jumlah pasien kunjungan yang cukup signifikan terhadap pelayanan Kesehatan Rumah Sakit pada berbagai departemen pelayanan Kesehatan. Selain itu juga adanya Modifikasi Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan, perubahan kualitas pelayanan kesehatan, penambahan beban kerja tenaga kesehatan, dampak psikologis, dan strategi manajerial bagi pelayanan kesehatan.

Berdasarkan rujukan kesembilan yang sudah dijelaskan di atas, relevansi artikel jurnal ini dipilih karena memberikan kontribusi gambaran umum mengenai dampak yang ditimbulkan dari pandemi covid-19 terhadap Rumah Sakit dalam menghadapi pandemi *Covid-19*. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dianggap dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian yang sedang dilakukan.

Rujukan kesepuluh diperoleh dari jurnal berjudul “Persepsi Pasien Dalam Implementasi Pelayanan Kesehatan Pada Masa Pandemi *COVID-19* di Wilayah Kota Bekasi Tahun 2020” pada 2021 yang ditulis oleh Nadya Rahma Puspita dan Mustakim dalam jurnal kedokteran dan Kesehatan Vol. 17, No. 1 Januari 2021 Hal 99-109. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Masa pandemik yang telah terjadi beberapa bulan dan memberikan dampak psikologis masyarakat, seperti timbul rasa panik dan cemas, dikarenakan kurangnya gambaran umum masyarakat tentang penjelasan mengenai *Covid-19* dan bagaimana implementasi pelayanan kesehatan dalam menyikapi *Covid-19*. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui gambaran persepsi pasien terhadap implementasi pelayanan kesehatan selama masa pandemik *Covid-19* di wilayah Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dengan desain studi *cross sectional* untuk mengetahui gambaran persepsi pasien terhadap

implementasi pelayanan kesehatan selama masa pandemi di Kota Bekasi. *Purposive sampling* menjadi teknik pengambilan sampel yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria dengan jumlah total responden yaitu 107 responden. Hasil dari penelitian ini hampir dari setengah responden kurang lebih berkunjung ke pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dengan persentase sebesar 44,9%. Selain itu, didapatkan 52,7% memiliki persepsi penerapan pengendalian teknis, 56,1% memiliki persepsi penerapan pengendalian administratif dan 52,7% memiliki persepsi penerapan Alat Pelindung Diri (APD) di pelayanan kesehatan wilayah Kota Bekasi sudah sesuai. Diharapkan institusi layanan Kesehatan dapat mempertahankan penerapan pengendalian teknis dengan cara membuat kebijakan internal yang berhubungan dengan pencegahan transmisi *Covid-19*.

Berdasarkan rujukan kesepuluh yang sudah dijelaskan di atas, relevansi tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan sama-sama meneliti mengenai pelayanan kesehatan di Kota Bekasi selama masa pandemi. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dianggap dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian yang sudah ada sebelumnya lebih banyak membahas penanganan *Covid-19* di Indonesia namun kebanyakan dari itu terfokuskan pada inovasi yang diciptakan dalam penanganan *Covid-19* saja (Amrynudin dan Katharina, 2020; Pratiwi, 2021 Syaidah, 2020;). Selain itu terdapat juga beberapa penelitian terdahulu yang kebanyakan membahas dampak dari pandemi *Covid-19* terhadap Rumah Sakit ataupun mengenai pelayanan kesehatan pada saat masa pandemi *Covid-19* (Ambarati, 2021; Puspita, 2021; Sarasnita, 2021; Utami, 2021). Namun, terdapat juga penelitian terdahulu yang sudah membahas mengenai *Collaborative governance* tetapi masih sedikit yang membahas mengenai kolaborasi dengan Rumah Sakit Swasta (Arisanti, 2020; Cahyono, 2020; Dewi, 2019).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu karena mengangkat isu yang sedang ramai diperbincangkan mengenai pandemi Covid-19, serta menggambarkan bagaimana model *Collaborative governance* antara Pemerintah dengan Rumah Sakit Swasta sebagai upaya penanganannya.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan serta berkontribusi pada pengembangan keilmuan Administrasi Negara terkait dengan *Collaborative governance* di Indonesia dan dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya dengan metode yang berbeda.

#### **1.4.2 Signifikansi Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, bahan rujukan maupun sebagai bahan evaluasi dikemudian hari bagi instansi pemerintahan dan Rumah Sakit swasta dalam upaya bersama-sama untuk memutus angka *Covid-19* di Indonesia. Selain itu, diharapkan penelitian ini sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kesiapan pemerintah beserta pihak lainnya yang terkait dalam penanganan *Covid-19*, Dan menambah pengalaman pribadi bagi penyusun dalam menulis karya ilmiah.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam penulisan laporan penelitian mengenai *Collaborative governance* Dalam Penanganan Pandemi *Covid-19* Di Kota Bekasi, Penulis membuat sistematika dalam lima Bab yaitu:

### **Bab I: Pendahuluan**

Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang terdiri dari signifikansi akademik dan signifikansi praktis, dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Kerangka Teori**

Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan tentang teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu *Collaborative governance* Dalam Penanganan Pandemi *Covid-19* Di Kota Bekasi yang diambil dari beberapa sumber seperti buku, jurnal, hasil penelitian berupa skripsi maupun tesis dan website serta produk hukum. Dalam bab ini peneliti juga menguraikan kerangka berfikir, dan asumsi penelitian.

### **Bab III: Metodologi Penelitian**

Pada bab ini menguraikan tentang pembahasan paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, teknik perolehan data, teknis analisis data, *goodness and quality criteria* penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian dan keterbatasan penelitian.

### **Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab hasil penelitian terdapat gambaran umum dari objek penelitian, memaparkan hasil penelitian dari rumusan masalah yang ingin diteliti dengan menyimpulkan dari hasil

wawancara yang telah dilakukan, membedakan dan menyamakan hasil penelitian dengan peneliti terdahulu dan menjelaskan pentingnya penelitian yang telah diteliti.

## **Bab V: Kesimpulan**

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menarik inti dari hasil penelitian tersebut. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Dalam bab ini terdapat rekomendasi penelitian yang berisi saran ataupun rekomendasi dari peneliti untuk peneliti selanjutnya, dan saran dari peneliti untuk tempat dari objek penelitian tersebut.

## **Daftar Pustaka**

Daftar Pustaka ini berisi tentang judul-judul buku, jurnal, produk hukum, dan alamat website yang digunakan sebagai referensi dalam laporan akhir ini.

## **Lampiran**

Lampiran ini berisi tentang keterangan-keterangan yang dianggap penting dan mendukung penulisan dalam proposal ini.